



Srategi Pengentasan Kemiskinan: Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan SDGs di Indonesia

Marta Ayu Saputri⁽¹⁾, Mazida Nurul Millah⁽²⁾, Reza Nurul Falah⁽³⁾, Siska Afiyati Dewi⁽⁴⁾

¹Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹martayus06@students.unnes.ac.id, ²mzdmillah2002@students.unnes.ac.id,

³rezanurulfalah@students.unnes.ac.id, ⁴sskfytd@students.unnes.ac.id

Abstract

The poverty rate in Indonesia reaches 24.06 million people out of a total population of 280 million. Various influencing factors include, for example, the still low quality of education. This study discusses the challenges, opportunities, and strategies for poverty alleviation in Indonesia within the context of achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly the first goal: "No Poverty." The research method used is descriptive qualitative with a literature review approach, analyzing secondary data from various sources. The findings indicate that the main challenges include unequal access to education, healthcare services, and employment opportunities. Opportunities lie in the development and utilization of technology. Meanwhile, the strategies that can be implemented include improving the quality of services such as education and infrastructure, conducting social assistance programs, economic empowerment, and targeted social aid distribution.

Keywords: *SDGs, poverty, Challenge, Opportunity, Strategy*

Abstrak

Angka kemiskinan di Indonesia mencapai 24,06 juta jiwa dari 280 juta penduduk yang ada. Berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu salah satu contohnya kualitas pendidikan yang masih kurang. Penelitian ini membahas tentang tantangan, peluang, dan strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama yaitu "Tanpa Kemiskinan". Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik tinjauan pustaka, yang menganalisis data sekunder dari berbagai sumber. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi ketidakmerataan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Peluang terletak pada pengembangan pemanfaatan teknologi. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas layanan seperti pendidikan dan infrastruktur, melakukan pendampingan sosial, dan pemberdayaan ekonomi serta pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran.

Kata Kunci: *SDGs, kemiskinan, Tantangan, Peluang, Strategi*

Received :07-04-2025

; Revised: 30-04-2024

; Accepted: 07-05-2025



Pendahuluan

SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda global untuk kesejahteraan manusia dan lingkungan. Dideklarasikan oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015, SDGs mencakup berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan salah satu isu utama yang dihadapi oleh seluruh dunia adalah pengentasan kemiskinan. Di negara-negara berkembang, kemiskinan menjadi masalah serius yang memerlukan solusi strategis serta kebijakan yang tepat sasaran. Tujuan pertama SDGs, yaitu *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan), bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan menjadi landasan bagi setiap negara dalam meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang maupun mendatang. Untuk mencapai target ini pada tahun 2030, setiap negara harus merumuskan strategi yang efektif dan berkelanjutan.

SDGs (*Sustainable Development Goals*) muncul pertama kali di agenda pembangunan global yang diusulkan oleh pemerintahan Peru, Guatemala, dan Uni Emirat Arab. Pada bulan juni 2012 konferensi PBB di Rio de Janeiro menjadi momen penting dalam perjanjian inisiatif pembangunan berkelanjutan global di masa depan. rangkaian inisiatif PBB melalui UNESCO ini bertujuan untuk mendukung negara di dunia bersama menciptakan dunia yang lebih bersih dan masyarakat global yang merata (Anissa & Nugraheni, 2024). Pembangunan berkelanjutan sendiri memiliki 17 pilar atau tujuan utama yaitu 1. Tanpa Kemiskinan; 2. Tanpa Kelaparan; 3. Kehidupan sehat dan sejahtera; 4. Pendidikan berkualitas; 5. Kesetaraan gender; 6. Air bersih dan sanitasi layak; 7. Energi bersih dan terjangkau; 8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak; 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur; 10. Mengurangi kesenjangan; 11. Keberlanjutan kota dan komunitas; 12. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab; 13. Aksi terhadap iklim; 14. Kehidupan bawah laut; 15. Kehidupan di darat; 16. Industri peralihan yang kuat dan perdamaian; 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan (Fadil & Isna Alfaien, 2023). Adapun tujuan yang pertama atau pilar pertama dari SDGs (pembangunan berkelanjutan) ini yaitu tanpa kemiskinan yang mengarah pada tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia dan mengurangi setidaknya separuh proporsi penduduk hidup dalam kemiskinan multidimensi pada tahun 2030.

Kemiskinan merupakan kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*) (Suwarno & Bramantyo, 2021). Menurut Suryadi (2022) terjadinya kemiskinan setidaknya disebabkan oleh karakteristik yang melekat pada penduduk miskin. Pertama yaitu

karakteristik rumah tangga antara lain jumlah anggota rumah tangga, rasio ketergantungan, rata-rata orang dewasa, rata-rata kesehatan dan pendidikan anggota rumah tangga, jenis pekerjaan (dibayar berdasarkan upah, bekerja sendiri), struktur pekerjaan dan pendapatan, maupun aset yang dimiliki rumah tangga diantaranya tanah, peralatan dan alat produksi, perumahan, serta perhiasan. Kedua yaitu karakteristik individu yang terkait dengan jenis kelamin Kepala Rumah Tangga (KRT), umur, dan pendidikan KRT.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan kemiskinan yang serupa dengan negara-negara lain. Berdasarkan data BPS (2024) jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta jiwa, sehingga diperlukan upaya sistematis melalui kebijakan terarah dan kolaborasi multisektor. Kemiskinan di Indonesia tidak hanya diukur dari aspek pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap ketidakmerataan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini dinilai masih kurang efektif (Umam & Furqon, 2024). Banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan yang terpencil, masih menghadapi tantangan besar dalam hal aksesibilitas dan kualitas layanan tersebut. Misalnya, rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat miskin mengakibatkan keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Selain ketidakmerataan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan, faktor struktural termasuk infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses jalan, dan listrik, semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat miskin. Keterbatasan infrastruktur tidak hanya menghambat mobilitas dan distribusi barang, tetapi juga mengurangi peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kemiskinan dan memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat (Zam, 2025). Faktor sosial, seperti diskriminasi dan ketidakadilan gender, juga memainkan peran penting dalam memperburuk kemiskinan, di mana perempuan sering kali menghadapi lebih banyak hambatan dalam mengakses sumber daya dan peluang. Kondisi ini tidak hanya meminggirkan kelompok rentan, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif dan memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur dasar. Sebagai salah satu negara dengan komitmen kuat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun juga memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia, penelitian ini bertujuan mengurai tantangan yang harus dihadapi, mengidentifikasi peluang percepatan pengentasan kemiskinan dan merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan langkah-langkah konkret menuju pencapaian SDGs tanpa kemiskinan di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menyediakan data deskriptif, berupa kata-kata atau naskah, tentang sesuatu yang diamati di lapangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data diperoleh melalui proses yang disebut pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik literature review atau tinjauan pustaka. Analisis data dilakukan dengan mengkaji temuan dari jurnal dan literatur mengenai tantangan pencapaian SDGs baik di Indonesia maupun di negara-negara berkembang. Selanjutnya, hasil analisis data diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk narasi yang komprehensif dalam laporan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

a. Tantangan Dalam Mewujudkan SDGs

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individu/kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya (BPS, 2018). Kemiskinan menjadi suatu permasalahan

global yang menarik perhatian dunia karena dapat berdampak ke berbagai aspek kehidupan seperti, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan juga terjadi di negara berkembang termasuk di Indonesia. Terdapat empat bentuk kemiskinan, yaitu (Syariah et al., 2024):

1. Kemiskinan relatif yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang tidak belum menyeluruh sampai ke seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan.
2. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang terjadi karena pendapatan individu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
3. Kemiskinan kultural dapat terjadi disebabkan adanya faktor budaya yang menyebabkan tidak adanya perubahan untuk hidup yang lebih baik.
4. Kemiskinan struktural dapat terjadi karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang diakibatkan oleh sistem politik dan budaya yang tidak mendukung adanya pengentasan kemiskinan.

Disisi lain, terdapat dua jenis kemiskinan yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, yang terjadi karena kelangkaan Sumber Daya Alam (SDA) dan prasarana umum.
2. Kemiskinan buatan, terjadi karena adanya sistem yang lebih modern atau pembangunan yang menjadikan masyarakat tidak dapat memperoleh sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata.

Kemiskinan di Indonesia menjadi suatu masalah yang serius dan perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan kemiskinan memiliki dampak yang luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Angka kemiskinan yang tinggi dapat menghambat pembangunan ekonomi, karena daya beli masyarakat yang rendah akan mengurangi potensi pertumbuhan industri dan investasi. Selain itu, kemiskinan juga dapat meningkatkan ketimpangan sosial yang berpotensi memicu konflik dan meningkatkan angka kriminalitas akibat dari kesenjangan ekonomi yang semakin lebar.

Adapun dalam mengatasi masalah kemiskinan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan dua program yaitu *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000-2015 yang mempunyai delapan tujuan salah satunya yaitu “Menanggulangi Kemiskinan” dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015-2030 yang di dalamnya terdapat 17 tujuan salah satunya yaitu “Tanpa Kemiskinan”. Hal ini

menandakan bahwa kemiskinan masih terus menjadi masalah yang harus diatasi. Akan tetapi, dalam proses mengatasi masalah kemiskinan masih terdapat tantangan-tantangan yang terjadi.

Dalam bidang sosial, masih terdapat ketimpangan dan kesenjangan akses. Hal ini dapat di lihat masih banyaknya masyarakat miskin yang mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Mengingat apabila tingkat pendidikan rendah, maka masyarakat akan terus terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki dasar keterampilan untuk memperoleh pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tingkat kesehatan yang rendah dan mahalnya biaya kesehatan juga menjadi penghambat masyarakat untuk dapat bekerja secara produktif yang dapat berdampak pada perolehan pekerjaan. Selain itu, apabila masyarakat tidak memperoleh pekerjaan yang layak, masyarakat akan terus terjebak dalam kemiskinan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pada bidang ekonomi, masih banyak tantangan yang terjadi. Kurangnya lapangan pekerjaan yang layak dan tingginya tingkat pengangguran menyebabkan banyak masyarakat miskin semakin miskin karena tidak memperoleh pendapatan yang stabil. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, sehingga kurangnya keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, banyaknya penduduk tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang tersedia membuat masyarakat yang tidak memiliki keterampilan akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Disisi lain, terdapat keterbatasan akses modal dan sumber daya. Banyak Usaha Kecil dan Mikro (UMKM) yang kesulitan dalam mendapatkan modal usaha, karena keterbatasan akses terhadap kredit. Selain itu, masih kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku usaha yang menyebabkan usaha mereka sulit untuk berkembang. Tata Kelola pemerintahan yang buruk juga dapat menjadi tantangan di bidang ekonomi. Sering kali dana bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran kepada yang membutuhkan.

Di bidang lingkungan, adanya perubahan iklim dan bencana alam juga menjadi sebuah tantangan dalam mengatasi kemiskinan. Mengingat dampak dari adanya bencana alam akan membuat masyarakat miskin merasa terbebani untuk mengatasinya. Kebutuhan untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan dasar, dan menciptakan rumah yang layak huni akan semakin sulit. Selain itu, adanya perubahan iklim dapat

menyebabkan cuaca ekstrem, gagal panen, dan krisis air yang akan berdampak bagi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

b. Peluang Dalam Mewujudkan SDGs

Kemiskinan sering kali dianggap sebagai permasalahan yang sampai saat ini sulit untuk diselesaikan. Adanya kemiskinan di Indonesia bukan hanya sebagai tantangan, akan tetapi terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mencapai tujuan pilar ke-1 SDGs “Tanpa Kemiskinan”

Banyaknya anak di Indonesia yang putus sekolah karena keterbatasan biaya dan juga belum mendapatkan pendidikan yang layak maka diperlukan pengembangan pendidikan melalui beasiswa, sekolah gratis dan fasilitas pendidikan yang memadai supaya anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, diperlukan program pelatihan keterampilan yang dapat membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan layak. Dengan adanya pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, maka peluang masyarakat miskin di Indonesia untuk keluar dari kemiskinan akan semakin besar.

Kesehatan yang baik menjadi salah satu faktor untuk keluar dari kemiskinan. Perlunya akses layanan kesehatan yang baik dan jaminan kesehatan yang memadai seperti BPJS akan membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau. Mengingat kesehatan yang baik dapat menunjang tingkat produktivitas dalam bekerja menjadi lebih tinggi dan mengurangi beban pada biaya pengobatan. Adanya akses kesehatan yang baik dan lebih mudah, menjadikan masyarakat memiliki peluang untuk hidup lebih sehat, tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat, dan tingkat kemiskinan akan menurun karena masyarakat dapat lebih fokus untuk bekerja.

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka masyarakat harus terbuka dengan kemajuan tersebut agar tidak mengalami ketertinggalan. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan teknologi untuk menunjang kegiatan ekonomi, seperti e-commerce yang dapat memungkinkan masyarakat miskin berjualan dan berbisnis secara online tanpa modal yang besar untuk menyewa toko. Adanya kemajuan teknologi dapat membuka

akses bagi masyarakat untuk bekerja, sehingga diharapkan menjadi awal yang baik untuk mengentaskan adanya kemiskinan.

Banyaknya pengangguran dapat berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan penciptaan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan penghasilan tetap, dan diharapkan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Sehingga pengangguran dan angka kemiskinan dapat berkurang. Selain itu, perlunya memberikan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui modal usaha atau pelatihan untuk mendorong mereka berkembang.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, investasi dalam infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, jalan, dan internet menjadi sebuah peluang untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Mengingat dengan adanya peningkatan investasi dan infrastruktur akan membantu meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, mempermudah mobilitas dan akses pekerjaan, dan mengurangi adanya ketimpangan antara desa dan kota. Sehingga antara masyarakat desa dan kota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang. Adanya infrastruktur yang kuat dapat menjadi sebuah peluang utama dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan secara efektif.

c. Strategi Pengentasan Kemiskinan untuk Mewujudkan SDGs

Kemiskinan merupakan masalah yang sulit diatasi oleh Pemerintah Indonesia. Menghadapi permasalahan tersebut, kebijakan dan regulasi yang mendukung pengurangan kemiskinan perlu diterapkan terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Selain itu, program pengentasan kemiskinan seperti bantuan keuangan, bantuan pangan, dan pelatihan keterampilan juga perlu dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat. Perlunya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, maka program pengentasan kemiskinan akan berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Indonesia berupaya mengurangi kemiskinan melalui berbagai strategi yang dirancang untuk menurunkan tingkat kemiskinan sesuai dengan kerangka SDGs.

Strategi tersebut mencakup beberapa kebijakan yang juga diterapkan melalui pelaksanaan program-program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan guna mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang memberikan bantuan pangan melalui kartu elektronik, Program Kartu Prakerja yang menyediakan pelatihan serta bantuan finansial bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) yang bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga miskin untuk mandiri dalam menciptakan pendapatan, Program Dana Desa yang memberikan dana kepada desa untuk membangun infrastruktur serta memperkuat ekonomi lokal, Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan akses kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan produktivitas serta pendapatan.

Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan nasional. Strategi kebijakan Bappenas untuk mencapai tujuan SDGs, khususnya dalam menghapus kemiskinan pada periode 2020-2024 dijelaskan dalam tiga hal:

1. Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas
 - a. Pemantapan jaminan sosial yang komprehensif dan memadai bagi penduduk miskin dan rentan.
 - b. Intergrasi bantuan dan subsidi tepat sasaran mendorong peningkatan keuangan inklusif.
 - c. Pengembangan kualitas layanan dasar, melalui tata kelola SPM yang handal dan responsif.
2. Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis
 - a. Penguatan Tim Koordinasi Daerah untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pencapaian SDGs.
 - b. Pemantapan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) yang terhubung dengan basis data kependudukan dan JKN.
 - c. Pengembangan sistem data dan layanan satu pintu untuk sinergi program-program pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

- d. Peningkatan kapasitas Pemda dalam analisis, perencanaan dan penganggaran untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
 - a. Mendorong kolaborasi peningkatan ekonomi keluarga melalui pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan mentoring.
 - b. Peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan.
 - c. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mengembangkan nilai tambah usaha produktif masyarakat.
 - d. Pengembangan usaha sosial rintisan (*social entrepreneurs*) untuk mengentaskan permasalahan sosial masyarakat.

Strategi kebijakan Bappenas untuk mencapai tujuan SDGs tanpa kemiskinan pada periode 2025-2030 dijabarkan dalam tiga aspek utama sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas
 - a. Pemantapan bantuan sosial yang terintegrasi dengan keuangan inklusif, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.
 - b. Pengembangan inovasi berbasis teknologi dalam layanan dasar di seluruh pelosok Indonesia.
 - c. Sinergi dan kerjasama pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, LSM) dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar.
2. Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis
 - a. Pengembangan strategi replikasi di daerah-daerah sulit untuk mendorong pengurangan kemiskinan.
 - b. Mendorong inovasi Pemda dalam percepatan pengurangan kemiskinan.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
 - a. Peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan menengah melalui berbagai pelatihan, pendampingan memulai usaha, dan mentoring.
 - b. Menjamin permodalan dan pasar bagi usaha ekonomi lokal.
 - c. Pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong usaha produktif masyarakat.
 - d. Menciptakan iklim usaha yang harmonis dengan didukung kebijakan yang adil dan merata.

Melalui berbagai pendekatan strategis untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

Langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan SDGs di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Pendidikan yang layak

Pendidikan merupakan dasar yang sangat penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, maka peluang untuk mencapai kehidupan yang sejahtera akan semakin terbuka sehingga individu dapat keluar dari kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi. Adapun program-program yang dapat dilakukan yaitu memberikan keringanan biaya pendidikan melalui beasiswa atau sekolah gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, membangun sekolah di daerah pedesaan atau wilayah yang terpencil agar masyarakat di wilayah tersebut dapat merasakan pendidikan yang layak. Penyediaan fasilitas sekolah yang lengkap termasuk buku dan tenaga kerja yang berkualitas dapat membantu meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia.

2. Penyuluhan dan pendampingan sosial

Langkah ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat kurang mampu untuk memperoleh informasi, edukasi, dan wawasan tentang isu-isu penting seperti kesehatan, pendidikan, pengelolaan keuangan, serta pengembangan keterampilan hidup. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memberikan sosialisasi tentang layanan kesehatan gratis seperti BPJS untuk masyarakat miskin. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak guna memutus rantai kemiskinan. Selain itu, dapat juga memberikan edukasi tentang pentingnya menabung, investasi sederhana dan akses perbankan agar masyarakat dapat mengatur serta mengelola keuangan dengan baik. Dengan pendampingan ini, diharapkan masyarakat dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan mereka di masa depan akan meningkat.

3. Peningkatan pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, akses pekerjaan yang layak, dan penyediaan modal usaha bagi masyarakat miskin. Selain itu, juga dengan meningkatkan pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Tujuan dari program pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kemandirian ekonomi. Adapun strategi yang dapat dilakukan antara

lain, meningkatkan keterampilan dan keahlian dengan mengadakan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Supaya masyarakat memiliki daya saing yang tinggi dapat di berikan program magang dan sertifikasi profesi. Selain itu, memberikan program pendampingan bagi masyarakat yang memiliki usaha agar usaha atau bisnis mereka dapat berkembang dan berjalan efektif.

4. Bantuan sosial yang tepat sasaran

Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang tunai atau non-tunai. Namun, distribusi bantuan harus tepat sasaran dan transparan agar program ini berhasil. Selain itu, harus ada pengawasan ketat untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke mereka yang paling membutuhkan.

5. Peningkatan infrastruktur

Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia terutama di daerah pedesaan dan terpencil, untuk memastikan setiap wilayah mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar.

Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut, diharapkan angka kemiskinan dapat menurun dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mencapai tujuan SDGs. Dengan adanya peningkatan infrastruktur menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam mendapat akses terhadap layanan dasar, meningkatkan peluang ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Kesimpulan

Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan Sustainable development Goals (SDGs) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Tantangan ini mencakup berbagai bidang, seperti dalam bidang sosial di mana terdapat kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dalam bidang ekonomi, seperti kurangnya lapangan pekerjaan yang layak dan tingginya tingkat

pengangguran. Sementara itu, di bidang lingkungan tantangan yang dihadapi meliputi perubahan iklim dan bencana alam.

Namun, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan seperti pengembangan pendidikan melalui beasiswa maupun sekolah gratis. Dalam hal kesehatan perlunya akses layanan kesehatan yang baik dan mudah, menjadikan masyarakat memiliki peluang hidup lebih sehat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, kemajuan teknologi dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Strategi yang perlu diambil untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia mencakup peningkatan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, penyuluhan dan pendampingan sosial, bantuan modal usaha, serta peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan, sangat penting untuk menciptakan akses yang setara terhadap layanan dasar. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuan SDGs serta memastikan keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka kemiskinan dapat berkurang secara signifikan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Kesimpulan

Saran untuk penelitian di masa depan:

1. Fokus pada evaluasi program pengentasan kemiskinan: Peneliti selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi dampak jangka panjang dari program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Indonesia, untuk mengidentifikasi kebijakan yang paling efektif dan mengatasi kendala yang masih ada.
2. Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan: Peneliti dapat mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh program pendidikan dan pelatihan keterampilan terhadap pengurangan kemiskinan, serta bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan di daerah terpencil.

3. Kolaborasi multi-sektor: Penelitian yang lebih mendalam mengenai cara efektif untuk meningkatkan kolaborasi antara sektor pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih terintergrasi dan berkelanjutan.

Referensi

- Anissa, A., & Nugraheni, N. (2024). Perkembangan Pendidikan Berkualitas Sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11181016>
- BPS. (2018). *Profil Kemiskinan*. Badan Pusat Statistik, 34, 1-6.
- BPS. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia*.
- Di, K., & Jember, K. (2025). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Strategi Pengentasan*. 3(50), 222-226.
- Djuno, S. D. A., Arham, M. A., & Payu, B. R. (2024). Analisis Ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pilar Kemiskinan Di Kab/Kota Kawasan Teluk Tomini. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 121–126. <https://doi.org/10.37905/jsep.v1i3.23841>
- Miftahussurur, M. dkk. (2016). Handbook of SGDs Series UNAIR. 01, 1-23.
- Fadil, K., & Isna Alfaien, N. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Sustainable Developments Goal's. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 7(2).
- Haris, A., Anas, A., Nurjaya, M., Iriawan, H., & Abdullah, M. T. (2024). Strategi dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 65–78. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v10i1.32690>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas, 35. https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf

- Suryadi, D. (2022). Karakteristik Rumah Tangga Miskin Ektrem di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 6(2), 108–121. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v6i2.4561>
- Suwarno, S., & Bramantyo, R. Y. B. (2021). Pemetaan Kemiskinan dengan Pendekatan Lingkungan sebagai Tahapan Pengentasan Kemiskinan di Kota Kediri. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 10(1). <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2290>
- Syariah, F., Islam, U., Sunan, N., M, E. A. A. P., Syariah, F., Islam, U., Sunan, N., Syariah, F., Islam, U., Sunan, N., Syariah, F., Islam, U., & Sunan, N. (2024). Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kemiskinan Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat Dengan Malaysia.
- Umam, K., & Furqon, I. (2024). Pengaruh Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia pada Tahun 2021. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 04(01). <https://doi.org/10.21274>
- Zam, M. (2025). Dampak Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Daerah Pedesaan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 285–299. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6707>

